

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA
YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIK SENJATA API REPLIKA
(AIRSOFT GUN) TANPA IZIN BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN
ASAS LEGALITAS**

ABSTRAK

Asas legalitas merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, dalam asas tersebut ada larangan untuk menggunakan dalam menentukan suatu tindakan merupakan tindak pidana yaitu analogi. Namun dalam prakteknya ada putusan-putusan hukum yang menggunakan analogi untuk menentukan suatu tindakan pidana, seperti dalam Putusan No. 75/Pid.sus/2017/PT.Plk, dalam perkara tersebut jelas terjadi kekosongan hukum yang dikarenakan tidak adanya aturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai kepemilikan senjata api replika (*airsoft gun*) tanpa izin, sehingga untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut hakim melakukan penemuan hukum (*Recht vinding*) yang dasarnya adalah dengan menganalogikan definisi senjata api replika (*airsoft gun*) dengan definisi senjata api, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, walaupun pada kenyataannya definisi senjata api replika (*airsoft gun*) dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dengan definisi senjata api dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sangat berbeda.

Untuk menyelesaikan masalah diatas, penulis melakukan penelitian secara studi kepustakaan, dengan mengumpulkan data sekunder, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan kasus-kasus pidana yang melibatkan senjata api replika (*airsoft gun*), kemudian data tersebut dikaitkan dengan permasalahan larangan penggunaan analogi dalam menentukan suatu tindakan pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukannya ketentuan-ketentuan tertulis baru di dalam Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai senjata api replika (*airsoft gun*) yang di dalamnya harus mengandung sifat perlindungan hukum yaitu Perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan Perlindungan hukum refresif (pemaksaan/Saksi).

Kata Kunci : *Asas Legalitas, Senjata Api Replika (Airsoft Gun), Analogi.*

*JURIDICAL REVIEW AGAINST GIVING CRIMINAL SANCTION GIVEN TO
THE OWNER OF A REPLICAS FIREARMS (AIRSOFT GUN) WITHOUT
PERMISSION BASED ON INDONESIA OF REGULATIONS WITH THE
LEGALITY PRINCIPLE*

ABSTRACT

The legality principle is a fundamental principle in criminal law, in that principle there is a prohibition to use in determining an act is a criminal offence that is an analogy. But in practice there are legal decisions that use an analogy to determine a criminal act, as in the verdict No. 75/Pid. SUS/2017/PT. Plk, in the case of a void of law that is said to be the absence of a specific rule of law governing the possession of replica firearms (airsoft gun) without permission, so to overcome the vacancy of the law judge made the invention of the law (Recht vinding) which is based analogy of the definition of firearms replica (airsoft gun) with the definition of firearms, in accordance with Emergency Law No. 10 of 1951, Although in fact the definition of a replica firearms (airsoft gun) in Police Regulation No. 8 of 2012 on The supervision and control of firearms for sports purposes with the definition of firearms in the Emergency Law No. 12 of 1951 is very different.

To overcome the above problem, the authors conduct research in the study of literature, by collecting secondary data, which consists of laws, literatures, and criminal cases involving a replica firearms (airsoft gun), then the data is associated with the problem of prohibition on the use of analogy in determining a criminal act.

The results showed that is required the new written provisions in the legislation that govern specifically concerning the replica firearms (airsoft gun) in which must contain the nature of the legal protections are the protection of the Law (prevention) and the protection of the Law of Refresif (compulsion/witness).

Keywords: *Legality Principle, Firearms Replica (Airsoft Gun), Analogy.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iii
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR	v
LEMBAR PERNYATAAN LAPORAN PENELITIAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	18

G. Sistematika Penelitian	24
---------------------------------	----

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS LEGALITAS, TEORI
PERLINDUNGAN HUKUM DAN DISKRESI26**

A. ASAS LEGALITAS	26
1. Definisi Asas Legalitas	26
2. Sejarah Asas Legalitas	29
3. Asas Legalitas Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP	32
B. PERLINDUNGAN HUKUM	36
1. Pengertian Perlindungan Hukum	36
2. Sarana Perlindungan Hukum	39
C. DESKRESI	40
1. Pengertian Deskresi	40
2. Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengambilan Putusan Atas Dasar Deskresi	42
3. Pengambilan Putusan dengan Dasar Deskresi Pada Prakteknya	46
D. PENEMUAN HUKUM (<i>RECHTSVINDING</i>)	49
1. Pengertian Penemuan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>)	49
2. Dasar Hukum Penemuan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>)	51
3. Metode Penemuan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>)	53

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEMILIKAN SENJATA API DAN
SENJATA API REPLIKA (*AIRSOFT GUN*)61**

A.	SENJATA API.....	61
1.	Definisi Senjata Api	61
2.	Pengaturan Kepemilikan Senjata Api di Indonesia	63
3.	Pengaturan Tindakan Penyalahgunaan Senjata Api yang Dikategorikan sebagai Tindak Pidana di Indonesia	68
B.	SENJATA API REPLIKA (<i>AIRSOFT GUN</i>)	73
1.	Definis Senjata Api Replika (<i>Airsoft Gun</i>)	73
2.	Sejarah Senjata Api Replika (<i>Airsoft Gun</i>) di Indonesia	75
3.	Perizinan Kepemilikan Senjata Api Replika (<i>Airsoft Gun</i>)	77
4.	Tindakan Penyalahgunaan Senjata Api Replika (<i>Airsoft Gun</i>) yang Dikategorikan sebagai Tindak Pidana di Indonesia	79

BAB IV TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIK SENJATA API REPLIKA (*AIRSOFT GUN*) TANPA IZIN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN ASAS LEGALITAS

A.	Pengaturan Mengenai Kepemilikan Senjata Api Replika (<i>Airsoft Gun</i>), Menurut Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia Saat Ini	82
B.	Pemberian Sanksi Kepada Pemilik Senjata Api Replika (<i>Airsoft Gun</i>) Berdasarkan Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Dilihat Dari Asas Legalitas	91

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	99
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106

